

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Jeffrey A. Winters (2011: 10) oligark merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Dan oligarki menjabarkan cara pertahanan itu dilakukan proses yang amat beragam di berbagai konteks politik dan periode sejarah. Keterlibatan politis langsung oligark sangat dibantu rezim hak milik dalam masyarakat yang bertingkat-tingkat. Makin besar kebutuhan oligark mempertahankan hak miliknya secara langsung makin mungkin oligarki berbentuk “kekuasaan langsung” oligark dengan sumber daya dan peran kekuasaan seperti jabatan pemerintah, “berlapis-lapis” di atas atau dicampur dengan kekuasaan material. Oligark dan oligarki muncul karena beberapa pelaku berhasil memupuk sumber daya kekuasaan material lalu menggunakan sebagiannya untuk mempertahankan kekayaan dengan dampak besar bagi sisa masyarakat.

”Oligarki kerap dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan harta kekayaan, kekuatan militer, pengaruh politik, atau kombinasi dari ketiganya. Aristoteles menyebut oligarki sebagai pemerintahan oleh segelintir orang yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan sendiri.” Fajlurrahman Jurdi (2013: xix)

Berbicara oligarki tidak lupa juga dengan dinasti politik, politik dinasti memang saling berkaitan dengan fenomena oligarki, munculnya politik dinasti bisa memudahkan oligarki bergerak. Setidaknya dengan dinasti langkah oligarki lebih mudah tercapai. Politik dinasti adalah kekuasaan

politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan keluarga itulah yang terjadi juga di Kota Banjar. Dinasti politik dapat berdampak buruk bagi akuntabilitas demokrasi dan pemerintahan karena cenderung serakah dan rawan terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Memang tidak ada aturan yang melarang keluarga untuk berpartisipasi aktif mencalonkan diri untuk memperebutkan jabatan politik baik eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, pejabat petahana baik disengaja atau tidak mendorong keluarganya untuk maju mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Meskipun dari pada itu peristiwa negatif dinasti politik sempat diantisipasi melalui undang-undang.

“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.”
(UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 7 huruf r)

Namun dengan berbagai usaha dari kelompok tertentu UU tersebut dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya hal demikian tidaklah dilarang dalam kehidupan berdemokrasi, namun fenomena tersebut tentunya tidak sehat dalam perkembangan demokrasi. Inilah paradoks demokrasi, di satu sisi tidak dilarang, tapi disisi lain tidak patut dan tidak etis karena rawan menciptakan oligarki yang keberadaannya terjadi akibat politik dinasti ketika kekuasaan terpusat dengan elite politik utama dan yang mendapat restu dari yang bersangkutan.

Kondisi pemerintahan di Kota Banjar ini mengindikasikan adanya praktik oligarki tersebut, yang mana telah terjadi pertahanan kekuasaan yang dilakukan dengan proses yang amat beragam di dalam konteks politik dimana seseorang yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan ingin mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.

Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan status perkembangannya sampai pada titik sebagai Kota sejak tanggal 21 Februari 2003. Kota Banjar sendiri sudah 16 tahun dipimpin oleh pasangan suami istri yaitu Herman Sutrisno dan Ade Uu Sukaesih yang sama-sama menjabat 2 periode yang mana Herman Sutrisno pertama menjabat pada tahun 2004 dan dilanjutkan oleh istrinya tahun 2013 yang terpilih kembali pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Berdasarkan hasil pilkada, ditetapkan pasangan Ade Uu Sukaesih dan Nana Suryana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banjar periode 2018-2024 serta dilantik pada 4 Desember 2018.

Selama 16 tahun ini, beberapa kebijakan pembangunan yang seharusnya menjadikan Banjar lebih baik terlihat kurang tepat sasaran dan menjadi sorotan masyarakat terutama Forum Reformasi Dinasti Banjar.

Forum Reformasi Dinasti Banjar kian berani muncul ke publik, kritik semakin menguat setelah banyak spanduk mengatas namakan Forum Reformasi Dinasti Banjar dipasang di beberapa tempat strategis di Kota

Banjar seperti Alun-alun, Jl Siliwangi dan lainnya sebagai bentuk protes atas kegagalan dinasti dalam mengelola beberapa kebijakan yang ada.

Gambar 1.1



Gambar 1.1 merupakan baligo yang di pasang di Jl Alun-alun Kota Banjar, pemasangan baligo ditempat strategis yang merupakan pusat Kota tentu banyak orang mudah melihatnya baligo juga dipasang tepat di pinggir lampu merah perempatan Alun-alun Kota Banjar di dekat pos polisi yang mana memungkinkan orang melihat baligo tersebut ketika sedang melintas.

Gambar 1.2



Baligo pada gambar 1.2 merupakan baligo yang juga dipasang oleh Forum Reformasi Dinasti Banjar di Jalan Siliwangi yang merupakan Jalan Provinsi

di dekat Banjar Atas tempat nongkrong yang cukup terkenal di Kota Banjar jalan tersebut merupakan jalanan ramai karena akses utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat sehingga baligo mudah untuk dilihat orang yang berkendara baik warga Banjar sendiri maupun warga luar Kota Banjar yang melintas melalui jalan tersebut.

Diawali dengan elit-elit politik Banjar yang kebetulan mencalonkan diri pada Pileg 2018 yang berlawanan atau bertentangan secara politik dengan Walikota Banjar dan semuanya kalah adalah orang-orang elit politik yang berpotensi dalam pemerintahan merupakan hal yang membuat Forum Reformasi Dinasti Banjar terbentuk. Sebagian dari orang-orang yang bergabung dengan Forum Reformasi ini dahulu merupakan mitra dinasti, seperti ketua Forum Reformasi Dinasti Banjar Soedrajat Argadireja atau sering disapa Ajat Doglo merupakan tim sukses Walikota selama 3 kali berturut-turut ada juga mantan Wakil Walikota Ahmad Dimiyati tahun 2004-2008 dilanjutkan 2008-2013 dan Darmaji Prawirasetia tahun 2013-2018 juga ikut bergabung dengan Forum Reformasi Dinasti Banjar.

Forum Reformasi Dinasti Banjar menyayangkan beberapa pembangunan yang di bangun tanpa perencanaan yang matang, pertama adalah pembangunan dan pemeliharaan Situ Leutik yang sudah dibangun sejak tahun 2007 dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 24 M yang mana tujuan awal dari pembangunan dan pemeliharaan Situ Leutik ini adalah untuk pengairan pesawahan yang ada disekitar Situ ketika tujuan utama gagal lalu seiring berjalannya waktu dikarenakan ada potensi wisata maka tujuan awal

pembangunan berubah menjadi objek wisata, ada juga pembangunan gedung Banjar *Conventin Hall* (BCH) dengan anggaran mencapai Rp 22 M, anggaran awal BCH yang diajukan ke DPRD sebesar Rp 10 M namun tiba-tiba menjadi Rp 15 M dan anggaran total akhir menjadi Rp 22 M lalu terakhir pembangunan yang juga disoroti adalah pembangunan jembatan Dobo yang dibangun dengan anggaran Rp 17 M lebih selain itu Wahana Wisata Waterpark Banjar yang rampung di bangun pada tahun 2009 dengan pembangunan menelan biaya Rp 27 M sekarang terbengkalai dan tidak lagi beroperasi.

Beberapa investor yang sebelumnya tertarik mengelola ternyata mengurungkan niat nya untuk mengelola BWP ini. Tidak adanya perbaikan dan sepi pengunjung mengakibatkan sulitnya menarik investor. Selain pembangunan yang menjadi sorotan Forum Reformasi Dinasti Banjar ada juga suap APDB, mahar pilkada, tenaga ahli walikota, tenaga ahli PDAM.

Ahmad Suhelmi dalam (Heri Herdiwanto dkk, 2019: 267) Mengatakan: “*Civil society* merupakan sesuatu yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara (*political society*).” Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul tentang *civil society* versus oligarki upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam meruntuhkan dinasti politik Kota Banjar untuk mengetahui bagaimana upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam fungsinya sebagai *Civil Society*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yaitu Bagaimana Upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam Meruntuhkan Dinasti Politik Kota Banjar?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus utamanya sesuai dengan sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam Meruntuhkan Dinasti Politik di Kota Banjar.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan dan pembatasan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam Meruntuhkan Dinasti Politik di Kota Banjar.

E. Manfaat Penelitian

Adapun mafaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi salah satu masukan akademis Ilmu Politik, tentang oligarki dan *Civil Society*. Dan pada

akhirnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan referensi selanjutnya

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hubungan Oligarki dan *Civil Society* dalam hal upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam meruntuhkan dinasti politik di Kota banjar juga bermanfaat bagi penulis khususnya untuk membandingkan antara ilmu teori yang didapat selama kuliah dengan penerapan di lapangan, serta menambah dan memperluas wawasan penulis.